



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 15%**

Date: Monday, October 08, 2018

Statistics: 820 words Plagiarized / 5463 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

---

Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak Selesai Pada Perusahaan Jasa Konsultan Teknik CV. Sinduraya Jombang Dwi Ermayanti Susilo\* Abstract CV Sinduraya is a contractor company which runs planning and project consultant service in Jombang that during this time use The Completed Contract Method in counting revenue.

This method admits the revenue when the job 100% finish because the company received the payment when complete. This research was done about the beginning 2011 that use the files from the company report in 2008 – 2009. The method of this research was analyzing of Financial report in 2009, so no need to analyze used SPSS.

From thr research was known that The Completed Contract Method has defect those werw the company had no account receivable in Balance Sheet and Job in process and those werw uncommon in financial report of a company especially planning and project consultant service. To overcome this defect, the company being advice to The Percentage of Completion Method because if one day the company gets long term the contract (more than a year to be finished), the company was still able to admit the revenue in the end of year, basee on the job percentage.

Keyword: complete, percentage, contract, method, revenue.

Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi (konsultansi) adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

Namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah perencanaan non teknis yang menyangkut sosial budaya dan kebiasaan - kebiasaan masyarakat calon pengguna konstruksi. Hal ini diperlukan agar sebuah konstruksi tidak hanya tahan lama tetapi juga tepat guna sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Dua hal tersebut menjadi sebuah acuan bagi konsultan perencana untuk menghasilkan sebuah output yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan diterima oleh pengguna konstruksi ( masyarakat ).

Untuk memenuhi sarana dan prasarana di suatu desa yang beberapa tahun ini sangatlah kurang terutama jalan lingkungan, dalam konteks pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan jalan tersebut sehingga kelancaran komunikasi dan arus distribusi dapat berjalan dengan baik dengan demikian kegiatan masyarakat dapat terpenuhi. Dinamika perkembangan daerah yang begitu cepat, sementara sumber daya daerah yang dimiliki relatif selalu terbatas, sering berakibat pertumbuhan pembangunan infrastruktur ini tidak mampu mengikuti perkembangan dan dinamika itu, sehingga diperlukan suatu pertahanan serta adanya suatu perencanaan dan pengawasan teknik yang matang.

Dalam kegiatan Perencanaan Teknis dimaksudkan untuk memberikan desain dan masukan cerdas terhadap tuntutan kebutuhan teknis yang diperlukan serta memberikan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Yang pada tujuannya adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat sekitar dan pengguna jalan selama masa pelayanan konstruksi tersebut.

Dan apabila ditinjau lebih makro maka keberadaan jalan ini akan mampu meningkatkan IPM (Indeks Pertumbuhan Manusia). Hal ini dikarenakan semakin kecil waktu tempuh dan mudah dalam pengaksesan terhadap pusat-pusat layanan masyarakat seperti rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lain. Indikator langsung terhadap peningkatan IPM ini ialah meningkatnya kebersihan dan kerapian lingkungan. Untuk itu banyak badan usaha baik swasta maupun pemerintah sangat memerlukan jasa perusahaan konsultan teknik dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan berbagai macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perusahaan konsultan adalah perusahaan-perusahaan yang ikut berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Dan dalam kaitannya dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi mempunyai peran sangat besar dalam tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pada sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor-sektor lainnya. Seperti badan usaha lainnya, perusahaan konsultan teknik juga harus melaporkan keberhasilan manajemennya dalam bentuk laporan keuangan pada setiap periode akuntansi.

Beberapa pos penting dalam laporan keuangan adalah "pendapatan", "biaya", dan "pajak". Dalam hal ini perusahaan akan menghitung laba rugi operasional dan akan dibandingkan antara pendapatannya dan biaya-biaya yang terjadi dan telah dikeluarkan selama periode tersebut.

Perusahaan memerlukan metode pengakuan pendapatan yang tepat supaya laporan keuangan akan mencerminkan hasil usaha yang layak dan wajar dalam periode berjalan. Laporan keuangan yang disajikan juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku agar tidak menyesatkan para pemakai laporan tersebut dalam proses pengambilan keputusan.

Pendapatan dalam suatu perusahaan biasanya akan diakui pada saat realisasinya, tetapi disebutkan juga bahwa dalam hal-hal tertentu diperbolehkan untuk mengakui pendapatan meskipun belum terjadi transaksi penerimaan kas. Ada beberapa saat pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut : Pendapatan diakui selama berlangsungnya produksi (Production Basis) Pendapatan diakui pada saat sesudah produk selesai Pendapatan diakui pada saat penjualan (Accrual Basis) Pendapatan diakui

pada saat diterimanya uang tunai (Cash Basis) Perusahaan konsultan teknik mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan jenis perusahaan lainnya.

Pada perusahaan konsultan terdapat rentang waktu yang cukup lama dalam produksinya, yaitu waktu yang cukup lama mulai dari rencana pembuatan desain sampai dengan selesainya suatu bangunan yang sesuai dengan rencana. Proyek-proyek yang dikerjakan oleh konsultan teknik yang bersangkutan merupakan proyek-proyek dari pemerintah Kabupaten Jombang.

Proyek dari Pemerintah harus selesai dikerjakan pada akhir tahun, karena setiap melakukan tutup buku juga harus menutup anggaran pemerintah. Oleh karena itu untuk perusahaan konsultan ini menggunakan metode kontrak selesai. Maka berangkat dari latar belakang yang disampaikan diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah : 1) Apakah metode kontrak selesai yang digunakan oleh perusahaan jasa konsultan teknik CV.

SINDURAYA sudah sesuai, 2) Bagaimana cara menyajikan laba rugi dan neraca perusahaan pada saat akhir periode akuntansi dan 3) Bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh metode kontrak selesai yang diterapkan perusahaan terhadap laba rugi dan neraca. Pengertian Akuntansi Menurut American Accounting Association yang dikutip oleh Soemarso S. R.

(1992:5) definisi dari akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pengertian Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No. 18 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. Pengertian Pendapatan Konsep pendapatan sering dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu dan mengenai kapan pendapatan harus dilaporkan. Dalam SAK No. 23 (1999:2) pengertian dari pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode, bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal) yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pengertian pendapatan yang diberikan oleh SAK adalah pengertian pendapatan dalam arti luas. Sedangkan menurut pandangan sempit, hanya hasil aktivitas yang menciptakan pendapatan investasi, dan keuntungan atau kerugian penjualan aktiva tetap tidak termasuk pendapatan.

Dalam definisi pendapatan (revenue) sebagai produk dari perusahaan, pengurangan dilakukan berdasarkan nilai tukar (cash equivalent) masih belum jelas pada titik yang mana pendapatan ini harus diukur dan dilaporkan. Untuk itu pendapatan membutuhkan kapasitas mengenai pengukuran dari pendapatan tersebut Waktu Pengakuan Pendapatan Menurut Sofyan Safri Harahap (1993:242) secara teoritis waktu pengakuan pendapatan dapat diakui pada berbagai saat berikut : Selama Berlangsungnya Produksi (Production Basis).

Ini terlihat pada kontrak pembangunan yang bersifat jangka panjang pada proses peningkatan nilai secara ilmiah (Accretion) dan Accrual. Accretion, adalah pelaporan pendapatan dalam masa produksi dengan cara mengakui kenaikan nilai karena pertumbuhan alamiah atau karena penambahan umur. Pertumbuhan alamiah atau penambahan umur ini dari pandangan ekonomi merupakan proses produksi.

Contoh dari accretion ini dapat dilihat pada peternakan, kehutanan, dan bertambahnya nilai karena proses penuaan dari pada anggur. Accrual, Contoh dari pelaporan revenue selama berlangsungnya produksi adalah accrual daripada jasa-jasa yang diberikan. Jumlah atau besarnya pendapatan biasanya juga telah ditetapkan, misalnya dengan kontrak atau perjanjian lainnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan ini juga dapat ditentukan bersamaan dengan pendapatannya. Hal ini biasanya dapat dijumpai pada "kontrak jangka panjang". Sesudah Produk Selesai.

Pelaporan pendapatan setelah selesainya produksi tergantung pada kepastian mengenai harga jual dan besarnya biaya tambahan (di luar biaya produksi). Apabila telah ada kontak penjualan dan penyerahan hasil produksi yang pasti, maka harga jual

dapat diketahui dan begitu juga dengan biaya penjualan. Kriteria utama untuk pengakuan pendapatan ini adalah : 1) Adanya harga pasar yang relatif stabil dan aktif, 2) Tidak adanya biaya pemasaran yang besar, 3) Adanya kemungkinan penukaran-penukaran unit-unit fisik tanpa pengaruh apa-apa terhadap harga jual (interchange ability of unit) Pada Saat Penjualan (Accrual Basis).

Dari pandangan yuridis formil penjualan terjadi apabila ada perpindahan hak dan suatu klaim pembayaran yang timbul. Maka biasanya para akuntan mengakui adanya penjualan pada saat penyerahan barang kepada langganan. Pelaporan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada : 1) Harga jual telah dapat ditentukan dengan pasti, 2) Produk yang telah dijual telah meninggalkan perusahaan dan diganti dengan suatu asset yang lain, jadi pertukaran telah terjadi, 3) Untuk kebanyakan perusahaan, penjualan merupakan peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonominya, 4) Kebanyakan biaya produksi atau pengadaan produksi tersebut telah dikeluarkan atau dapat ditentukan dengan mudah.

Pada Saat Penagihan Kas (Cash Basis). Pelaporan pendapatan pada teori ini mempunyai dua kriteria tentang penundaan pengakuan pendapatan sampai saat penerimaan tunai, yaitu : 1) Apabila tidak mungkin mengukur nilai aktiva yang diterima secara cukup tepat, 2) Apabila masih ada biaya-biaya yang material jumlahnya yang masih harus dikeluarkan, dan biaya-biaya ini tidak dapat ditaksir jumlahnya secara tepat.

Metode Pengakuan Pendapatan Para ahli akuntansi telah menciptakan dua metode pengakuan pendapatan yang digunakan pada perusahaan konsultan. Metode tersebut disusun oleh The AICPA Issuance pada tahun 1955, disitu disebutkan bahwa dua metode yang umumnya digunakan adalah : The Percentage of Completion Method Menurut metode persentase penyelesaian, perusahaan akan mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan tingkat kemajuan penyelesaian kontrak dan tidak menunggu sampai kontrak selesai. Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada ukuran tertentu dan kemajuan penyelesaian kontrak.

Pengukuran ini memerlukan suatu taksiran mengenai biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan. Biaya-biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan laba yang akan diakui selama periode pembangunan dibebankan pada persediaan, yaitu bangunan dalam pelaksanaan. Jika suatu perusahaan memproyeksikan suatu kerugian atas kontrak sebelum penyelesaian, jumlah seluruh kerugian harus segera diakui. The Completed Contract Method.

Menurut metode kontrak selesai, pendapatan baru diakui setelah suatu kontrak selesai dikerjakan. Maksudnya disini bahwa pendapatan baru diakui hanya jika penjualan

barang atau jasa telah selesai. Dengan demikian jika dalam suatu periode akuntansi tidak ada satupun kontrak yang diselesaikan maka tidak ada pencatatan atas rugi laba kontrak.

Metode kontrak selesai sebaiknya digunakan apabila suatu perusahaan terutama mempunyai kontrak-kontrak jangka pendek, apabila kondisi-kondisi untuk menggunakan akuntansi persentase penyelesaian tidak dipenuhi, atau apabila ada ketidakpastian yang melekat dalam kontrak diluar resiko-resiko usaha yang normal. Biaya (Beban) / Expense Dalam membicarakan masalah pendapatan ini, tidak dapat dilepaskan dari biaya (beban).

Karena dalam tiap periode perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya dalam usaha menghasilkan pendapatan tersebut. Dalam SAK per 1 Juni (1999:13) definisi beban adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam suatu periode, atau yang tidak memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomis masa berikutnya. Yang dimaksud biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa.

Pajak Didalam perhitungan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibayar oleh wajib pajak dikenal dengan sistem kompensasi yaitu perbandingan atau matching atas pajak masukan dan pajak keluaran. Jaja Zakaria (1987:17) sebagai berikut "Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak" Untuk pajak penghasilan juga terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Selain itu menurut A. Ridwan Alim, SH (1986:15) juga mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenakan terhadap seseorang atau badan usaha selaras penghasilan yang diterimanya dalam jangka waktu satu tahun pajak. Laporan Keuangan Dalam menjalankan usaha, pasti diperlukan alat pencatat dan alat pengukur proses kegiatan usaha.

Pencatatan dan pengukuran ini merupakan suatu alat pengawasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar kegiatan usaha dapat dijalankan dengan wajar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Alat ukur yang lazim digunakan dalam usaha adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Zaki Baridwan (1992:17) adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan Kemudian dalam SAK dijelaskan lebih lanjut bahwa informasi keuangan yang disajikan tersebut akan bermanfaat bila dipenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu 1) Dapat

Dipahami, 2) Relevan, 3) Keandalan yang berarti jujur, dapat diperiksa, netral serta mempunyai pertimbangan yang sehat dan yang terakhir 4) Dapat Dibandingkan Setiap pelaporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen perusahaan terdiri atas 1) Neraca, 2) Laporan Laba Rugi, 3) Perubahan Posisi Keuangan, 4) Laporan Perubahan Modal.

Dari beberapa pelaporan keuangan tersebut, dalam penelitian ini akan menggunakan neraca dan laporan laba rugi. Kedua pelaporan tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian yang akan dilakukan. Kerangka Konseptual Dari tinjauan teori yang telah dikemukakan diatas, maka kerangka konseptual yang dapat diajukan dalam penelitian yang berjenis diskriptif kuantitatif adalah : Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel  
1. Pendapatan merupakan kenaikan bruto dari modal yang berasal dari barang ataupun jasa yang dijual. 2.

Biaya Operasional adalah semua biaya yang benar-benar dibebankan kepada pendapatan yang telah direalisasi untuk kepentingan perusahaan pada periode yang sedang berlangsung. 3. Nilai Kontrak. adalah besarnya harga yang telah disepakati antara konsultan dengan pemberi pekerjaan yaitu dinas yang terkait. Nilai kontrak ini dihitung dari rencana anggaran biaya ditambah PPN10%. 4. Metode Kontrak Selesai.

adalah penghitungan penghasilan pada saat semua pekerjaan telah selesai dikerjakan. Jadi selama proyek yang dikerjakan sedang berjalan tidak ada pembayaran apapun yang dapat dicatat. Karena berdasarkan metodenya, kontrak yang dikerjakan belum selesai. 5. Pajak Pajak merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah atas pekerjaan yang telah diterima oleh perusahaan.

Untuk jasa konsultasi konstruksi dikenakan PPN sebesar 10 % dan PPh Final sebesar 4 % dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PPh yang dikenakan kepada perusahaan konsultan adalah PPh Pasal 22 Badan. Penentuan Populasi Dan Sampel Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut : Kontrak, Laporan Keuangan dan Laporan Pajak.

Dari data-data diatas telah didapatkan populasi dari proses penelitian ini. Sedangkan sampelnya diambil tahun 2008. Dari populasi dan sampel di atas akan diolah sesuai kebutuhan penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian yang diharapkan. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif.

Data-data yang telah diperoleh merupakan data yang sudah jadi, tidak perlu lagi menggunakan statistik untuk mengolah data tersebut. Data yang didapatkan untuk proses penelitian ini bersumber dari manajemen perusahaan, bagian administrasi dan

umum, serta bagian keuangan. Laporan keuangan diperoleh dari perusahaan yang menjadi objek penelitian langsung karena perusahaan yang diteliti tidak termasuk perusahaan yang go public sehingga laporan keuangannya tidak diterbitkan di media. Semua laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan tahunan yang diambil satu tahun terakhir.

Teknik Analisis Data Tahap-tahap dalam analisis ini adalah sebagai berikut : Analisis perhitungan pendapatan menurut metode kontrak selesai. Pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai oleh Sophar Lumbantoruan (1996:205-207) : Tahun 2009 : Tidak ada penghasilan pada tahun 2009 dikarenakan proyek belum selesai dikerjakan.

Tahun 2010 : Proyek dari tahun 2009 telah diselesaikan pada tahun 2010, maka pengakuan pendapatannya : Pendapatan (nilai kontrak) Rp xxx Analisis perhitungan laba rugi dan neraca menurut metode kontrak selesai. Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada perusahaan konsultan yang bersangkutan hanya fokus kepada Laporan Laba Rugi dan Neraca, sehingga penelitian ini hanya menggunakan kedua laporan tersebut. Perhitungan Laba Rugi Tahun 2010 : Pendapatan (nilai kontrak) Rp xxx Biaya konstruksi 2009 Rp xxx 2010 Rp xxx Total biaya ( Rp xxx ) Laba usaha Rp xxx

PEMBAHASAN Dinas Prasarana Jalan Untuk kontrak konsultan pada Dinas Prasarana tidak sama dengan dinas lainnya.

Pada Dinas Prasarana, kontrak konsultan dibagi menjadi 2 (dua) kontrak yaitu kontrak perencanaan dan kontrak pengawasan. Tetapi untuk pembayarannya (termin) sama saja dengan yang lain yaitu dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan ataupun pengawasan selesai. Termin pengawasan dilampiri dengan asuransi 10 % dari nilai kontrak pengawasan.

Pembangunan Drainase Jalan Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kontrak Nomor, Tanggal : 050/23.II.1/415.24/2008, 18 Maret 2008 Nilai Kontrak : Rp 5.726.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 5.726.000,00 DPP : Rp 5.726.000,00 : 1,1 = Rp 5.205.455,00 PPN : 10 % x Rp 5.205.455,00 = Rp 520.546,00 PPh : 4 % x Rp 5.205.455,00 = Rp 208.218,00 Potongan Rp 728.764,00 Pendapatan Rp 4.997.236,00  
Pembangunan Talud Jalan Keboan Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kontrak Nomor, Tanggal : 050/23.III.9/415.24/2008, 18 Maret 2008 Nilai Kontrak : Rp 5.929.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 5.929.000,00 DPP : Rp 5.929.000,00 : 1,1 = Rp 5.390.000,00 PPN : 10 % x Rp 5.390.000,00 = Rp 539.000,00 PPh : 4 % x Rp 5.390.000,00 = Rp 215.600,00 Potongan Rp 754.600,00 Pendapatan Rp 5.174.400,00  
Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen Kecamatan Bareng Kontrak Nomor, Tanggal : 050/23.IV.27/415.24/2008, 18 Maret 2008 Nilai Kontrak : Rp 15.851.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 15.851.000,00 DPP : Rp 15.851.000,00 : 1,1 = Rp 14.410.000,00 PPN : 10 % x Rp 14.410.000,00 = Rp 1.441.000,00 PPh : 4 % x Rp 14.410.000,00 = Rp 576.400,00 Potongan Rp 2.017.400,00 Pendapatan Rp 13.833.600,00  
Pembangunan Drainase Jalan Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kontrak Nomor, Tanggal : 050/74.II.1/415.24/2008, 31 Juli 2008 Nilai Kontrak : Rp 4.263.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 4.263.000,00 DPP : Rp 4.263.000,00 : 1,1 = Rp 3.875.455,00 PPN : 10 % x Rp 3.875.455,00 = Rp 387.546,00 PPh : 4 % x Rp 3.875.455,00 = Rp 155.018,00 Potongan Rp 542.564,00 Pendapatan Rp 3.720.436,00  
Pembangunan Talud Jalan Keboan Kedungbogo Kecamatan Ngusikan Kontrak Nomor, Tanggal : 050/74.III.9/415.24/2008, 31 Juli 2008 Nilai Kontrak : Rp 4.428.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 4.428.000,00 DPP : Rp 4.428.000,00 : 1,1 = Rp 4.025.455,00 PPN : 10 % x Rp 4.025.455,00 = Rp 402.546,00 PPh : 4 % x Rp 4.025.455,00 = Rp 161.018,00 Potongan Rp 563.564,00 Pendapatan Rp 3.864.436,00  
Rehabilitasi Jalan Bareng – Kayen Kecamatan Bareng Kontrak Nomor, Tanggal : 050/74.IV.27/415.24/2008, 31 Juli 2008 Nilai Kontrak : Rp 11.715.000,00  
Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 11.715.000,00 DPP : Rp 11.715.000,00 : 1,1 = Rp 10.650.000,00 PPN : 10 % x Rp 10.650.000,00 = Rp 1.065.000,00 PPh : 4 % x Rp 10.650.000,00 = Rp 426.000,00 Potongan Rp 1.491.000,00 Pendapatan Rp 10.224.000,00  
Dinas Pengairan Dinas Pengairan merupakan dinas yang membidangi urusan sarana dan prasarana keairan, seperti rehabilitasi ataupun pemeliharaan dam dan

jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Jombang. Semua yang berhubungan dengan sarana dan prasarana keairan dikelola oleh Dinas Pengairan.

Untuk kontrak konsultan pada Dinas Pengairan dibuat satu kontrak yang meliputi pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Untuk pembayaran (termin) sama dengan dinas lainnya yaitu dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan dan pengawasan selesai. Untuk termin perencanaan setelah pekerjaan perencanaan mencapai 100 % dan termin pengawasan setelah pekerjaan pengawasan mencapai 100 % dan juga dilampiri dengan asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk. Rehabilitasi Dam Ingaskerep dan Jaringannya Kecamatan Kesamben Kontrak Nomor, Tanggal : 602/0190.16/P2T-APBD/415.25/2008, 31 Juli 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 13.900.000,00 Pengawasan : Rp 10.400.000,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 13.900.000,00 DPP : Rp 13.900.000,00 : 1,1 = Rp 12.636.364,00 PPN : 10 % x Rp 12.636.364,00 = Rp 1.263.636,00 PPh : 4 % x Rp 12.636.364,00 = Rp 505.455,00 Potongan Rp 1.769.091,00 Pendapatan Rp 12.130.909,00 Termin II Nilai Rp 10.400.000,00 DPP : Rp 10.400.000,00 : 1,1 = Rp 9.454.545,00 PPN : 10 % x Rp 9.454.545,00 = Rp 945.455,00 PPh : 4 % x Rp 9.454.545,00 = Rp 378.182,00 Potongan Rp 1.323.637,00 Pendapatan Rp 9.076.363,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tanjungwadung Kecamatan Kabuh Kontrak Nomor, Tanggal : 602/2381.21/P2T-APBD.PAK/415.25/2008, 26 September 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 3.657.000,00 Pengawasan : Rp 2.728.000,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 3.657.000,00 DPP : Rp 3.657.000,00 : 1,1 = Rp 3.324.545,00 PPN : 10 % x Rp 3.324.545,00 = Rp 332.455,00 PPh : 4 % x Rp 3.324.545,00 = Rp 132.982,00 Potongan Rp 465.437,00 Pendapatan Rp 3.191.563,00 Termin II Nilai Rp 2.728.000,00 DPP : Rp 2.728.000,00 : 1,1 = Rp 2.480.000,00 PPN : 10 % x Rp 2.480.000,00 = Rp 248.000,00 PPh : 4 % x Rp 2.480.000,00 = Rp 99.200,00 Potongan Rp 347.200,00 Pendapatan Rp 2.380.800,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau yang disingkat DLHK merupakan dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup dan kebersihan di wilayah Kabupaten Jombang. DLHK mengatur tentang tata kota, menjaga eksistensi lingkungan hidup serta menjaga kebersihan lingkungan.

Tata kota yang dimaksud adalah mengenai pertamanan yang ada di Kabupaten Jombang. Untuk kontrak konsultan pada DLHK sama dengan dinas lainnya yaitu dibuat satu kontrak yang meliputi pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Untuk pembayaran (termin) juga sama, dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan dan pengawasan selesai.

Untuk termin perencanaan setelah pekerjaan perencanaan mencapai 100 % dan termin pengawasan setelah pekerjaan pengawasan mencapai 100 % dan juga dilampiri dengan asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk. Pembuatan

Dinding Rumah Mesin, Pondasi Rumah Mesin, dan Rabat Lantai Kecamatan Jombang Kontrak Nomor, Tanggal : 050/349/415.33/2008, 28 Pebruari 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 3.340.000,00 Pengawasan : Rp 2.500.000,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 3.340.000,00 DPP : Rp 3.340.000,00 : 1,1 = Rp 3.036.364,00 PPN : 10 % x Rp 3.036.364,00 = Rp 303.636,00 PPh : 4 % x Rp 3.036.364,00 = Rp 121.455,00 Potongan Rp 425.091,00 Pendapatan Rp 2.914.909,00 Termin II Nilai Rp 2.500.000,00 DPP : Rp 2.500.000,00 : 1,1 = Rp 2.272.727,00 PPN : 10 % x Rp 2.272.727,00 = Rp 227.273,00 PPh : 4 % x Rp 2.272.727,00 = Rp 90.909,00 Potongan Rp 318.182,00 Pendapatan Rp 2.181.818,00 Pembangunan Gedung 3R Kecamatan Jombang Kontrak Nomor, Tanggal : 050/1623/415.33/2008, 10 Oktober 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 4.000.000,00 Pengawasan : Rp 3.000.000,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 4.000.000,00 DPP : Rp 4.000.000,00 : 1,1 = Rp 3.636.364,00 PPN : 10 % x Rp 3.636.364,00 = Rp 363.636,00 PPh : 4 % x Rp 3.636.364,00 = Rp 145.455,00 Potongan Rp 509.091,00 Pendapatan Rp 3.490.909,00 Termin II Nilai Rp 3.000.000,00 DPP : Rp 3.000.000,00 : 1,1 = Rp 2.727.273,00 PPN : 10 % x Rp 2.727.273,00 = Rp 272.727,00 PPh : 4 % x Rp 2.727.273,00 = Rp 109.091,00 Potongan Rp 381.818,00 Pendapatan Rp 2.618.182,00 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan merupakan dinas yang membidangi urusan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan ataupun rehabilitasi gedung sekolah serta pengadaan perlengkapan yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah yang ada di Kabupaten Jombang.

Semua yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pendidikan dikelola oleh Dinas Pendidikan. Untuk kontrak konsultan pada Dinas Pendidikan dibuat satu kontrak yang meliputi pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Untuk pembayaran (termin) sama dengan dinas lainnya yaitu dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan dan pengawasan selesai.

Untuk termin perencanaan setelah pekerjaan perencanaan mencapai 100 % dan termin pengawasan setelah pekerjaan pengawasan mencapai 100 % dan juga dilampiri dengan asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk. Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Kontrak Nomor, Tanggal : 021/1891/415.30/2008, 25 Juli 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 7.486.000,00 Pengawasan : Rp 5.614.000,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 7.486.000,00 DPP : Rp 7.486.000,00 : 1,1 = Rp 6.805.455,00 PPN : 10 % x Rp 6.805.455,00 = Rp 680.546,00 PPh : 4 % x Rp 6.805.455,00 = Rp 272.218,00 Potongan Rp 952.764,00 Pendapatan Rp 6.533.236,00 Termin II Nilai Rp 5.614.000,00 DPP : Rp 5.614.000,00 : 1,1 = Rp 5.103.636,00 PPN : 10 % x Rp 5.103.636,00 = Rp 510.364,00 PPh : 4 % x Rp 5.103.636,00 = Rp 204.145,00 Potongan Rp 714.509,00 Pendapatan Rp 4.899.491,00 Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah atau yang biasa disebut Dinas Kimbangwil merupakan dinas yang membidangi

urusan sarana dan prasarana permukiman serta pengembangan wilayah.

Sarana dan prasarana tersebut meliputi pembangunan ataupun rehabilitasi gedung-gedung sarana umum dan jalan. Untuk jalan yang dikelola oleh Dinas Kimbangwil yaitu jalan yang ada dalam satu lingkungan desa. Untuk kontrak konsultan pada Dinas Kimbangwil sama dengan dinas lainnya yaitu dibuat satu kontrak yang meliputi pekerjaan perencanaan dan pengawasan.

Untuk pembayaran (termin) juga sama, dibayarkan setelah pekerjaan perencanaan dan pengawasan selesai. Untuk termin perencanaan setelah pekerjaan perencanaan mencapai 100 % dan termin pengawasan setelah pekerjaan pengawasan mencapai 100 % dan juga dilampiri dengan asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang telah ditunjuk. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Kepuhkajang Kecamatan Perak Kontrak Nomor, Tanggal : 622/257.42/415.26/2008, 12 Maret 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 9.394.000,00 Pengawasan : Rp 7.056.500,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 9.394.000,00 DPP : Rp 9.394.000,00 : 1,1 = Rp 8.540.000,00 PPN : 10 % x Rp 8.540.000,00 = Rp 854.000,00 PPh : 4 % x Rp 8.540.000,00 = Rp 341.600,00 Potongan Rp 1.195.600,00 Pendapatan Rp 8.198.400,00 Termin II Nilai Rp 7.056.500,00 DPP : Rp 7.056.500,00 : 1,1 = Rp 6.415.000,00 PPN : 10 % x Rp 6.415.000,00 = Rp 641.500,00 PPh : 4 % x Rp 6.415.000,00 = Rp 256.600,00 Potongan Rp 898.100,00 Pendapatan Rp 6.158.400,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Slombok Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kontrak Nomor, Tanggal : 622/257.78/415.26/2008, 12 Maret 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 6.259.000,00 Pengawasan : Rp 4.724.500,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 6.259.000,00 DPP : Rp 6.259.000,00 : 1,1 = Rp 5.690.000,00 PPN : 10 % x Rp 5.690.000,00 = Rp 569.000,00 PPh : 4 % x Rp 5.690.000,00 = Rp 227.600,00 Potongan Rp 796.600,00 Pendapatan Rp 5.462.400,00 Termin II Nilai Rp 4.724.500,00 DPP : Rp 4.724.500,00 : 1,1 = Rp 4.295.000,00 PPN : 10 % x Rp 4.295.000,00 = Rp 429.500,00 PPh : 4 % x Rp 4.295.000,00 = Rp 171.800,00 Potongan Rp 601.300,00 Pendapatan Rp 4.123.200,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Caruk dan Dusun Jambu Desa Jabon Kecamatan Jombang Kontrak Nomor, Tanggal : 622/1060.A.17/415.26/2008, 24 September 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 5.914.700,00 Pengawasan : Rp 4.436.300,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 5.914.700,00 DPP : Rp 5.914.700,00 : 1,1 = Rp 5.377.000,00 PPN : 10 % x Rp 5.377.000,00 = Rp 537.700,00 PPh : 4 % x Rp 5.377.000,00 = Rp 215.080,00 Potongan Rp 752.780,00 Pendapatan Rp 5.161.920,00 Termin II Nilai Rp 4.436.300,00 DPP : Rp 4.436.300,00 : 1,1 = Rp 4.033.000,00 PPN : 10 % x Rp 4.033.000,00 = Rp 403.300,00 PPh : 4 % x Rp 4.033.000,00 = Rp 161.320,00 Potongan Rp 564.620,00 Pendapatan Rp 3.871.680,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Makam Agung Desa Sengon Kecamatan Jombang Kontrak Nomor, Tanggal : 622/1060.A.18/415.26/2008, 24 September 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 1.945.900,00 Pengawasan : Rp 1.459.700,00 Perhitungan Pendapatan

Termin I Nilai Rp 1.945.900,00 DPP : Rp 1.945.900,00 : 1,1 = Rp 1.769.000,00 PPN : 10 % x Rp 1.769.000,00 = Rp 176.900,00 PPh : 4 % x Rp 1.769.000,00 = Rp 70.760,00 Potongan Rp 247.660,00 Pendapatan Rp 1.698.240,00 Termin II Nilai Rp 1.459.700,00 DPP : Rp 1.459.700,00 : 1,1 = Rp 1.327.000,00 PPN : 10 % x Rp 1.327.000,00 = Rp 132.700,00 PPh : 4 % x Rp 1.327.000,00 = Rp 53.080,00 Potongan Rp 185.780,00 Pendapatan Rp 1.273.920,00 Pembangunan Jalan Lingkungan Kapten Tendean – Sudirohusodo Desa Sengon Kecamatan Jombang Kontrak Nomor, Tanggal : 622/1060.A.19/415.26/2008, 24 September 2008 Nilai Kontrak : Perencanaan : Rp 1.544.400,00 Pengawasan : Rp 1.158.300,00 Perhitungan Pendapatan Termin I Nilai Rp 1.544.400,00 DPP : Rp 1.544.400,00 : 1,1 = Rp 1.404.000,00 PPN : 10 % x Rp 1.404.000,00 = Rp 140.400,00 PPh : 4 % x Rp 1.404.000,00 = Rp 56.160,00 Potongan Rp 196.560,00 Pendapatan Rp 1.347.840,00 Termin II Nilai Rp 1.158.300,00 DPP : Rp 1.158.300,00 : 1,1 = Rp 1.053.000,00 PPN : 10 % x Rp 1.053.000,00 = Rp 105.300,00 PPh : 4 % x Rp 1.053.000,00 = Rp 42.120,00 Potongan Rp 147.420,00 Pendapatan Rp 1.010.880,00 Tabel 4.1 CV. SINDURAYA Perhitungan Pendapatan TAHUN 2008 (Rupiah) \_ (Rupiah) \_ Sumber : CV.

SINDURAYA Jombang Dari data dalam tabel 4.1 yang telah disajikan, terdapat perhitungan pendapatan perusahaan selama tahun 2008. Penerimaan yang diperoleh perusahaan tidak sebesar nilai kontrak yang diterimanya, tetapi sebesar nilai kontrak dikurangi dengan potongan pajak. Pajak untuk perusahaan konsultan meliputi PPN sebesar 10 % dan PPh sebesar 4 %.

Pada saat menerima pencairan dana dari Bank yang telah ditetapkan pemerintah, pajak dari tiap pekerjaan sudah dipotong oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) melalui Bank tersebut. Untuk kontrak dari Dinas Prasarana Jalan, perusahaan mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 47.912.000,00. Dari total nilai kontrak tersebut jumlah PPN-nya sebesar Rp 4.355.638,00 dan PPh-nya sebesar Rp 1.742.254,00.

Total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 6.097.892,00. Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari Dinas Prasarana Jalan sebesar Rp 41.814.108,00. Untuk kontrak dari Dinas Pengairan, perusahaan mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 30.685.000,00.

Dari total nilai kontrak tersebut jumlah PPN-nya sebesar Rp 2.789.546,00 dan PPh-nya sebesar Rp 1.115.819,00. Total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 3.905.365,00. Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari Dinas Pengairan sebesar Rp 26.779.635,00. Untuk kontrak dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, perusahaan mendapatkan 2 (dua) paket pekerjaan dengan total nilai

kontrak sebesar  
Rp 12.840.000,00.

Dari total nilai kontrak tersebut jumlah PPN-nya sebesar Rp 1.167.272,00 dan PPh-nya sebesar Rp 466.910,00. Total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 1.634.182,00. Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 11.205.818,00.

Untuk kontrak dari Dinas Pendidikan, perusahaan mendapatkan 1 (satu) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 13.100.000,00. Dari total nilai kontrak tersebut jumlah PPN-nya sebesar Rp 1.190.910,00 dan PPh-nya sebesar Rp 476.363,00. Total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 1.667.273,00. Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 11.432.727,00.

Untuk kontrak dari Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, perusahaan mendapatkan 5 (lima) paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar Rp 43.893.300,00. Dari total nilai kontrak tersebut jumlah PPN-nya sebesar Rp 3.990.300,00 dan PPh-nya sebesar Rp 1.596.120,00. Total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebesar Rp 5.586.420,00.

Sehingga pendapatan yang diterima oleh perusahaan dari Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah sebesar Rp 38.306.880,00. Setelah melihat perhitungan pendapatan di atas, semua pendapatan diakui oleh perusahaan setelah proyek selesai dikerjakan atau setelah perusahaan mencapai pekerjaan 100 %. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan konsultan CV. SINDURAYA telah sesuai menggunakan metode kontrak selesai dalam mengakui pendapatannya.

Perhitungan Laba Rugi dan Penyajian Neraca Perusahaan Tabel 4.2 CV. SINDURAYA Laporan Laba Rugi TAHUN 2008 (Rupiah) \_ Sumber : CV. SINDURAYA Dari data tabel 4.2 yang disajikan di atas, terdapat perhitungan laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2008. Pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan sebesar nilai kontrak dari masing-masing dinas, karena potongan pajaknya akan menjadi biaya pajak bagi perusahaan.

Sehingga pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi tersebut tidak sebesar pendapatan yang diperoleh sesungguhnya. Pendapatan yang diperoleh perusahaan selama tahun 2008 dari Dinas Prasarana Jalan adalah sebesar Rp 47.912.000,00; Dinas Pengairan sebesar Rp 30.685.000,00; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar

Rp 12.840.000,00; Dinas Pendidikan sebesar Rp 13.100.000,00; dan dari Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah sebesar Rp 43.893.300,00 dan dibulatkan menjadi Rp 43.893.000,00. Biaya operasional perusahaan sebesar Rp 79.200.000,00 yaitu terdiri dari biaya gaji sebesar Rp 66.000.000,00; biaya listrik sebesar Rp 780.000,00; biaya transportasi sebesar Rp 1.800.000,00; biaya komunikasi sebesar Rp 900.000,00; biaya ATK (alat tulis kantor) sebesar Rp 5.720.000,00; dan biaya lain-lain sebesar Rp 4.000.000,00.

Sehingga total biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 79.200.000,00. Biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan adalah sebesar nilai pajak yang dipotong oleh BPKD Jombang yaitu Rp 18.891.132,00 atau dibulatkan menjadi Rp 18.892.000,00. Seperti yang telah dijelaskan di atas, pada saat penerimaan pendapatan sudah dikurangi pajak, tetapi dalam pelaporannya pendapatan dilaporkan sebesar nilai kontrak dan pajak yang dipotong akan menjadi biaya pajak bagi perusahaan. Tabel 4.3 CV. SINDURAYA Neraca TAHUN 2008 (Ribuan Rupiah) \_Sumber : CV.

SINDURAYA Jombang Dari data tabel 4.3 yang disajikan di atas, terdapat penyajian neraca tahun 2008. Nilai uang tunai yang ada di bagian keuangan sebesar Rp 2.588.000,00; sedangkan total uang yang ada di Bank sebesar Rp 82.000.000,00. Jadi total aktiva lancar CV. SINDURAYA sebesar Rp 84.588.000,00. Aktiva tetapnya terdiri dari tanah yang diperoleh pada tahun 1999 senilai Rp 10.000.000,00; sebuah gedung yang didirikan pada tahun 1999 senilai Rp 30.000.000,00; kendaraan yaitu sebuah mobil yang diperoleh pada tahun 2003 senilai Rp 80.000.000,00; dan inventaris kantor senilai Rp 25.000.000,00. CV.

SINDURAYA tidak mempunyai hutang dalam bentuk apapun. Modal awal perusahaan sebesar Rp 130.000.000,00. Modal tersebut dimiliki oleh 2 (dua) orang pemegang saham yaitu Dodik Urianto dengan persentase sebesar 80 % yaitu Rp 104.000.000,00; dan Kholisoh dengan persentase sebesar 20 % yaitu Rp 26.000.000,00.

Dampak Dari Pengakuan Pendapatan Berdasarkan Metode Kontrak Selesai Semua pekerjaan yang dilakukan akan menimbulkan dampak bagi perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam metode pengakuan pendapatan akan memberikan dampak bagi perusahaan tersebut. Metode pengakuan pendapatan tidak akan mempengaruhi kewajaran dari laporan laba rugi perusahaan.

Meskipun menggunakan metode selain metode kontrak selesai, laporan laba rugi perusahaan juga bisa dinyatakan wajar apabila nilai dari rekening-rekening yang ada

dalam perusahaan tersebut tidak berlebihan atau mengalami penggelembungan dana (mark up). Metode pengakuan pendapatan akan mempengaruhi besarnya laba atau rugi perusahaan apabila pekerjaan terjadi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi dan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian.

Pendapatan yang diakui perusahaan, nilainya tidak dipengaruhi oleh jumlah biaya proyek yang terjadi pada tiap-tiap periode akuntansi sehingga apabila pada saat biaya yang terjadi sangat besar, sedangkan persentase fisiknya rendah maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jika perusahaan menggunakan metode kontrak selesai, maka semua masalah yang terjadi dalam metode persentase penyelesaian tidak akan terjadi.

Hal tersebut dikarenakan pekerjaan telah diselesaikan dalam satu periode akuntansi, sehingga pada saat penyajian laporan laba rugi dan neraca semua pendapatan diterima semua dan semua biaya telah dikeluarkan oleh perusahaan. Dampak yang lebih signifikan jika perusahaan memakai metode kontrak selesai yaitu perusahaan ini tidak mempunyai piutang dan pekerjaan dalam proses.

Hal tersebut dikarenakan pekerjaan diselesaikan dalam satu periode akuntansi sehingga pendapatannya sudah diterima semua pada saat akhir tahun. Oleh karena itu, dalam perusahaan ini tidak terjadi piutang dan tidak adanya pekerjaan dalam proses. BAB V SIMPULAN DAN SARAN SIMPULAN Dalam mengakui pendapatannya, CV.

SINDURAYA menggunakan metode kontrak selesai, dimana semua pendapatan baru diakui pada saat pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kontrak telah selesai dikerjakan. Semua pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada saat pencairan dana tidak sebesar nilai yang ada dalam dokumen kontrak. Pendapatan yang diterima sudah dikurangi dengan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dipotong langsung melalui Bank terkait.

Semua perjanjian kontrak yang diterima oleh perusahaan yang berasal dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Jombang, cara pembayarannya sama yaitu dibayarkan setelah pekerjaan selesai dikerjakan atau mencapai persentase fisik sebesar 100 %. Metode kontrak selesai yang digunakan oleh perusahaan pada saat ini lebih sesuai karena semua kontrak yang diterima oleh perusahaan memiliki jangka waktu satu periode akuntansi atau tidak melebihi satu tahun anggaran sehingga sangat sesuai.

Pendapatan baru diakui oleh perusahaan apabila semua pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dalam perjanjian kontrak. Hal ini akan menimbulkan masalah jika penetapan suatu termin berada diantara dua periode akuntansi dan perusahaan hanya mengakui pendapatan di akhir periode termin tersebut. Semua metode pengakuan

pendapatan yang digunakan oleh perusahaan akan menimbulkan akibat terhadap laporan keuangan perusahaan terutama dalam neraca perusahaan.

Akibat dari penerapan metode kontrak selesai terhadap neraca perusahaan yaitu perusahaan ini tidak mempunyai piutang dan pekerjaan dalam proses. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang diterima oleh perusahaan diselesaikan dalam satu periode akuntansi sehingga pendapatannya sudah diterima semua pada saat akhir tahun. Oleh karena itu, dalam perusahaan ini tidak terjadi piutang dan tidak adanya pekerjaan dalam proses.

SARAN Dalam mengakui pendapatan, sebaiknya perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian karena apabila suatu waktu perusahaan mendapatkan kontrak jangka panjang yang melebihi satu periode akuntansi perusahaan akan mengalami masalah jika tetap menggunakan metode kontrak selesai. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, perusahaan bisa mengakui pendapatan pada akhir periode akuntansi sebesar persentase pekerjaan yang telah diselesaikan.

Tetapi jika menggunakan metode kontrak selesai perusahaan akan mengakui pendapatan hanya pada periode akhir selesainya pekerjaan tersebut, sedangkan pada periode awal tidak akan ada pengakuan pendapatan. Metode pengakuan pendapatan tidak akan mempengaruhi kewajaran dari laporan laba rugi maupun neraca perusahaan, sehingga apabila menggunakan metode persentase penyelesaian, laporan laba rugi dan neraca perusahaan juga tetap bisa wajar.

Oleh karena itu, menggunakan metode apapun bisa asalkan

#### INTERNET SOURCES:

- 
- <1% - <http://cvmultikaryasukses.blogspot.com/2014/10/pengertian-pengertian-istilah-dalam.html>
  - <1% - <http://pukebramantio.blogspot.com/2010/03/istilah-dan-definisi-dalam-konstruksi.html>
  - <1% - <https://superkurnia.wordpress.com/2015/12/18/pengertian-akuntansi/>
  - <1% - <http://scholar.unand.ac.id/1064/>
  - 1% - <https://alena02.wordpress.com/2011/11/15/uu-no-18-th-1999/>
  - <1% - <http://penulis-mimpi.blogspot.com/2008/04/undang-undang-no-18-tahun-1999-tentang.html>
  - 10% - <https://dwiermayanti.wordpress.com/2011/11/16/pendapatan-4/>

<1% - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28463/4/Chapter%20II.pdf>

<1% - <http://adesuherman.blogspot.com/2011/11/laporan-keuangan-perusahaan.html>

1% -

<https://www.scribd.com/document/97841935/Jurnal-Eksis-Vol-III-Nomor-1-Peb-2008>